

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan data yang diperoleh dari sensus penduduk pada tahun 2023, terdapat 29 juta lansia di Indonesia atau hampir 12% dari total populasi masyarakat Indonesia. Dari data tersebut dapat diproyeksikan bahwa akan ada peningkatan pada tahun 2025, yaitu adanya peningkatan menjadi 33,7 juta jiwa atau 11,8% dari total populasi penduduk (Badan Pusat Statistika, 2024). Peningkatan ini menandakan bahwa di Indonesia akan memasuki “*aging population*” atau dinamai fase di mana proporsi di suatu negara yang penduduk lansianya semakin meningkat.

Provinsi Daerah Khusus Jakarta menurut data dari Badan Pusat Statistika (BPS) yang menyatakan bahwa populasi lansia sejumlah 1,17 juta jiwa pada tahun 2024. Tidak semua lansia berada dalam kondisi ekonomi yang baik. Jumlah total penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2023 tercatat sebanyak 477.830 orang (4,44% dari total penduduk), dan pada Maret 2024 menurun menjadi 464.930 orang (4,30% dari total penduduk) (BPS Jakarta, 2024).

Upaya untuk memberikan perlindungan sosial bagi lansia yang berada dalam kondisi ekonomi sulit, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan program Kartu Lansia Jakarta (KLJ). Pada tahun 2023, jumlah penerima KLJ mencapai 206.695 orang. Sementara itu, pada tahun 2024, jumlah penerima KLJ tercatat sebanyak 141.533 orang dalam tahap ketiga penyaluran bantuan sosial. Penurunan jumlah penerima ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk

pembaruan data penerima manfaat dan kebijakan verifikasi yang lebih ketat, yaitu (1) ketidaklayakan DTKS dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI (2) ketidaklayakan DTKS dari hasil Musyawarah Kelurahan (Muskel) (3) ketidaklayakan pada *Web Service* kependudukan dari Kemendagri RI (4) kepemilikan aset (memiliki kendaraan mobil dan NJOP > 1 M) (5) warga binaan panti sosial (6) variabel khas daerah lainnya (PNS/TNI/POLRI, tidak miskin berdasarkan penilaian masyarakat setempat, menggunakan air kemasan bermerk 19 liter) (7) penerima bantuan sosial sejenis yang bersumber dari APBN, yaitu penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Lansia yang berhak menerima bantuan ini harus berusia 60 tahun ke atas, tidak memiliki penghasilan tetap, serta terdaftar dalam basis data kesejahteraan sosial pemerintah. Prioritas diberikan kepada lansia dengan keterbatasan fisik, sakit menahun, atau hidup sendiri tanpa dukungan keluarga (Dinas Sosial DKI Jakarta, 2024).

Salah satu kriteria ideal dalam Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) adalah bahwa lansia penerima manfaat berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, yang ditandai antara lain dengan kepemilikan tempat tinggal dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp1 miliar. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan benar-benar tepat sasaran kepada mereka yang secara ekonomi membutuhkan. Namun, dalam implementasinya di lapangan, khususnya di Kelurahan Cilangkap, masih ditemukan lansia penerima KLJ yang tinggal di rumah dengan NJOP di atas Rp1 miliar, yang secara administratif tidak memenuhi syarat sebagai penerima

bantuan. Kondisi ini menimbulkan persoalan dalam hal akurasi data, ketepatan sasaran program, serta keadilan dalam distribusi bantuan. Ketidaksesuaian ini juga menimbulkan pertanyaan terkait mekanisme seleksi dan verifikasi yang digunakan dalam penetapan penerima manfaat, serta sejauh mana pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan.

Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) merupakan salah satu upaya konkret Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjawab tantangan demografis dan sosial-ekonomi yang dihadapi oleh lansia. Selain KLJ, berbagai program kesejahteraan sosial lainnya telah diimplementasikan untuk mendukung lansia di Indonesia. Salah satu tantangan utama dalam implementasi Program KLJ adalah kurangnya sosialisasi yang memadai, sehingga banyak lansia tidak sepenuhnya memahami persyaratan dan prosedur program. Keterbatasan anggaran dan sumber daya sering kali menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial di berbagai daerah. Implementasi program kesejahteraan sosial melibatkan berbagai dimensi administratif dan operasional, termasuk komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain bantuan finansial, Program KLJ juga menyediakan fasilitas tambahan seperti pangan murah dan transportasi gratis bagi lansia. Komunikasi yang efektif dan pengawasan yang baik merupakan elemen kunci dalam keberhasilan program kesejahteraan sosial bagi lansia. Pelayanan kesehatan dan sosial merupakan komponen penting dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar. Tata kelola yang baik sangat penting dalam memastikan keberhasilan program bantuan sosial tunai bagi lansia. Implementasi kebijakan daerah memiliki peran strategis dalam

meningkatkan kesejahteraan sosial lansia melalui program-program seperti KLJ. Efektivitas pelayanan publik menjadi salah satu indikator utama keberhasilan program bantuan sosial bagi lansia seperti KLJ.

Pemilihan Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur sebagai lokasi penelitian "Implementasi Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur" didasarkan pada beberapa pertimbangan penting. Jakarta Timur memiliki jumlah penduduk lansia tertinggi di antara wilayah administratif DKI Jakarta, dengan 309.260 jiwa pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistika, 2024), menjadikannya area yang sangat relevan untuk meneliti dampak program KLJ. Kelurahan Cilangkap di Kecamatan Cipayung mencerminkan keragaman demografis kota dengan campuran area perkotaan dan pinggiran, memberikan sampel yang representatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif terkait program KLJ di berbagai kondisi sosial-ekonomi.

Urgensi penelitian ini menjadi penting mengingat proyeksi peningkatan jumlah lansia di Jakarta Timur yang diperkirakan mencapai 324.920 jiwa pada tahun 2025. Sebagai wilayah dengan populasi lansia terbesar, Jakarta Timur menjadi fokus utama implementasi program kesejahteraan lansia seperti KLJ, sehingga penelitian di wilayah ini dapat memberikan wawasan berharga tentang efektivitas kebijakan pemerintah. Selain itu, aksesibilitas data yang lebih komprehensif di wilayah ini dapat memfasilitasi pengumpulan data yang lebih mendalam dan analisis yang lebih akurat.

Hasil penelitian di Kelurahan Cilangkap berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan dan pengembangan program KLJ, tidak hanya di Jakarta Timur tetapi juga sebagai model untuk wilayah lain di DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Karakteristik sosial-ekonomi yang beragam di Kelurahan Cilangkap, mencakup berbagai tingkat pendapatan dan latar belakang sosial, memungkinkan analisis yang lebih komprehensif tentang bagaimana program KLJ berdampak pada lansia dari berbagai latar belakang kondisi sosialnya. Dengan memilih lokasi ini, penelitian ini tidak hanya akan memberikan wawasan berharga tentang efektivitas program dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar di Jakarta Timur, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan dan program serupa di masa depan.

Negara Republik Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi warga negaranya melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Hal ini dilakukan melalui penyelenggaraan program secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tujuannya adalah agar upaya tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar warga negara melalui berbagai bentuk: perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan jaminan sosial. Perlindungan sosial berkaitan dengan tanggung jawab negara untuk mewujudkan kesejahteraan secara umum dan secara khusus, dengan upaya pencegahan dan penanggulangan kejadian atau situasi yang membahayakan ikatan sosial individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat luas.

Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) merupakan salah satu upaya konkret Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjawab tantangan demografis dan sosial-ekonomi yang dihadapi oleh lansia. Namun, implementasi program ini tidak lepas dari berbagai kendala, seperti keterbatasan kuota dan masalah pendataan. Penelitian Nanda Saskia Putri dan Wahyu Nurharjadm (2023) memberikan wawasan penting tentang efektivitas program KLJ di tingkat RW, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut. Studi ini relevan untuk memahami bagaimana program KLJ diterapkan pada skala lokal dan membuka peluang untuk memperluas analisis ke wilayah lain, seperti Kelurahan Cilangkap, yang memiliki konteks sosial-ekonomi yang lebih beragam.

Berbagai program kesejahteraan sosial lainnya telah diimplementasikan untuk mendukung lansia di Indonesia. Salah satu pendekatan yang menarik adalah melalui pemberdayaan ekonomi, seperti yang diteliti oleh Mona Silviany (2015) dalam program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Meskipun fokusnya berbeda, penelitian ini memberikan perspektif tentang bagaimana kebijakan kesejahteraan sosial dapat memenuhi harapan penerima manfaat. Dengan demikian, penelitian ini menjadi dasar pembandingan untuk menganalisis dampak KLJ secara lebih spesifik.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi Program KLJ adalah kurangnya sosialisasi yang memadai, sehingga banyak lansia tidak sepenuhnya memahami persyaratan dan prosedur program. Lisa Novita Hartanti dan Lina Aryani (2022) menyoroti peran penting Dinas Sosial DKI Jakarta dalam mengatasi kendala ini. Penelitian mereka memberikan gambaran tentang

bagaimana hambatan sosialisasi memengaruhi efektivitas program KLJ. Temuan ini relevan untuk memperdalam analisis mengenai faktor-faktor lain yang memengaruhi keberhasilan implementasi KLJ di Kelurahan Cilangkap.

Keterbatasan anggaran dan sumber daya sering kali menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial di berbagai daerah. Hal ini juga relevan dalam konteks Program KLJ, terutama ketika jumlah penerima manfaat mengalami penurunan akibat verifikasi data yang lebih ketat. Penelitian Ivo Rangoly (2013) di Kecamatan Tanimbar Selatan memberikan wawasan tentang bagaimana kendala anggaran dapat memengaruhi implementasi kebijakan kesejahteraan lansia secara umum. Studi ini menjadi referensi penting untuk memahami tantangan serupa dalam konteks KLJ di Jakarta Timur.

Implementasi program kesejahteraan sosial melibatkan berbagai dimensi administratif dan operasional, termasuk komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks Program KLJ, faktor-faktor ini juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan program. Penelitian Sheryn Wijayanti dan Indah Prabawati (2020) mengevaluasi aspek-aspek tersebut dalam program kesejahteraan lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit. Temuan mereka memberikan dasar untuk mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor serupa memengaruhi implementasi KLJ di Kelurahan Cilangkap.

Program KLJ juga menyediakan fasilitas tambahan seperti pangan murah dan transportasi gratis bagi lansia. Namun, pemanfaatan fasilitas ini sering kali rendah karena berbagai alasan. Penelitian Hani Alfiah (2023) di Kelurahan Kebon Baru dan Jati Padang mengidentifikasi masalah-masalah tersebut, memberikan

wawasan tentang tantangan yang dihadapi lansia dalam memanfaatkan layanan tambahan dari KLJ. Studi ini relevan untuk memahami sejauh mana layanan tambahan tersebut berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar.

Pelayanan kesehatan dan sosial merupakan komponen penting dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar. Selain bantuan finansial, aspek-aspek ini juga perlu dipertimbangkan dalam evaluasi Program KLJ. Penelitian Siti Nur Ainiah (2021) tentang Posyandu Lansia menunjukkan bagaimana pelayanan kesehatan dapat memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan fisik dan mental lansia. Studi ini menjadi referensi berharga untuk mengeksplorasi dimensi kesehatan dalam konteks dampak KLJ.

Tata kelola yang baik sangat penting dalam memastikan keberhasilan program bantuan sosial tunai bagi lansia. Dalam konteks Program KLJ, tata kelola mencakup proses pendataan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan kepada penerima manfaat. Penelitian Mohammad Tanzil Multazam et al. (2018) tentang tata kelola bantuan sosial tunai bagi lansia terlantar di Yogyakarta memberikan wawasan tentang praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola KLJ.

Implementasi kebijakan daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lansia melalui program-program seperti KLJ. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk koordinasi antarinstansi dan keterlibatan masyarakat setempat. Penelitian Rika Dwi Ayu Anggraini dan Wahyu Adi Pradana (2022) di Kabupaten Jember memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi

keberhasilan implementasi kebijakan daerah untuk kesejahteraan lansia. Studi ini relevan sebagai pembanding untuk menganalisis keberhasilan kebijakan serupa di DKI Jakarta.

Efektivitas pelayanan publik menjadi salah satu indikator utama keberhasilan program bantuan sosial bagi lansia seperti KLJ. Dalam penelitian Wahyu Andrianto et al. (2023), tantangan-tantangan terkait efektivitas pelayanan publik dianalisis secara mendalam dalam konteks Kota Tasikmalaya. Temuan mereka memberikan gambaran tentang bagaimana kualitas pelayanan dapat ditingkatkan untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar berdampak pada peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki persamaan dalam fokus utama, yaitu mengkaji implementasi Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menunjukkan adanya kontribusi positif program. Terdapat perbedaan signifikan dalam hal lokasi penelitian yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta, seperti Kelurahan Kebon Baru, Jati Padang, dan Bintaro, serta fokus spesifik penelitian yang beragam. Misalnya, penelitian (Hani Alfiah, 2023) di Kelurahan Kebon Baru dan Jati Padang mengidentifikasi masalah rendahnya pemanfaatan fasilitas pangan murah dan transportasi gratis, sementara (Tri Novianti, 2020) di Kelurahan Bintaro menemukan bahwa sosialisasi menjadi kendala utama dalam implementasi program.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) umumnya lebih berfokus pada aspek administratif, evaluatif, atau dampak ekonomi secara umum, serta menggunakan pendekatan birokratik atau kebijakan

publik dalam menganalisis implementasi program. Selain itu, sebagian besar studi terdahulu cenderung hanya mendeskripsikan pelaksanaan program tanpa memberikan alternatif solusi konkrit terhadap permasalahan yang muncul di lapangan.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan pendekatan pekerja sosial yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan individu dan komunitas lansia secara holistik, dengan mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan lingkungan. Pendekatan ini menempatkan lansia sebagai subjek yang memiliki martabat, bukan sekadar objek penerima bantuan. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi masalah dalam implementasi Program KLJ, tetapi juga menawarkan rancangan program sebagai solusi alternatif yang dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan program di tingkat lokal. Rancangan program ini disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan konteks sosial masyarakat setempat, serta mengacu pada prinsip-prinsip kerja sosial seperti partisipasi, keberlanjutan, dan pemberdayaan.

Sistem pelayanan sosial Kartu Lansia Jakarta (KLJ) di Kelurahan Cilangkap telah dirancang untuk memberikan dukungan komprehensif bagi warga lanjut usia yang membutuhkan. Proses dimulai dengan pendaftaran dan verifikasi, di mana lansia atau keluarganya mendaftar di kantor kelurahan dengan membawa dokumen yang diperlukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Tidak Mampu. Petugas kelurahan kemudian melakukan verifikasi data dan dokumen pendaftar, memasukkan data calon penerima yang memenuhi syarat ke

dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan melakukan survei lapangan untuk memastikan kelayakan calon penerima.

Kelurahan Cilangkap merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan luas wilayah 605,2 hektar. Kelurahan ini memiliki 6 RW dan 46 RT, dengan jumlah penduduk sekitar 35.883 jiwa. Dalam konteks pelaksanaan program Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kelurahan Cilangkap telah mengimplementasikan program ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan lansia di wilayahnya, lokasi ini memiliki keunikan yaitu secara geografis dan penduduknya merupakan kombinasi antara perkotaan dan pinggiran.

Implementasi program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, menghadapi beberapa isu masalah yang mempengaruhi efektivitasnya dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar. Kendala-kendala tersebut mencakup efektivitas sosialisasi program yang menyebabkan ketidakpahaman peserta tentang hak dan kewajiban mereka, keterbatasan kuota penerima bantuan yang belum dapat menjangkau seluruh lansia yang membutuhkan, proses verifikasi data yang memakan waktu, ketidaksesuaian data kependudukan dengan data bank yang menghambat pencairan dana, serta kesulitan aksesibilitas teknologi bagi para lansia dalam menggunakan perangkat elektronik seperti ATM. Selain itu, keterbatasan kemampuan lansia dalam mengakses informasi dan teknologi juga menyulitkan mereka dalam proses pendaftaran online. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa meskipun program KLJ memiliki tujuan yang baik, implementasinya

masih memerlukan perbaikan dalam berbagai aspek untuk dapat secara efektif meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar di wilayah tersebut.

Melihat Fenomena masalah yang dihadapi dalam implementasi program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, peneliti telah mengamati dan menganalisis bagaimana pelaksanaan program ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar lansia di wilayah tersebut. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program KLJ, penelitian ini menggunakan kerangka teori yang dikemukakan oleh teori Ripley dan Franklin (1982), Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan untuk mengukur kualitas implementasi itu sendiri. Ripley dan Franklin, mengakui pentingnya kepatuhan (*compliance*), kelancaran (*execution*), dan kinerja (*performance*) dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan distributif seperti KLJ. Integrasi ketiga dimensi ini memperkaya analisis dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang seberapa efektif program KLJ benar-benar berjalan di lapangan.

Kepatuhan (*Compliance*), sebagai dimensi pertama, merujuk pada sejauh mana tindakan pelaksana program sesuai dengan aturan, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan dalam kebijakan KLJ. Hal ini mencakup ketaatan terhadap pedoman pelaksanaan, konsistensi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks KLJ, kepatuhan dapat diukur dengan melihat sejauh mana petugas kelurahan mengikuti prosedur pendaftaran dan verifikasi penerima manfaat, memastikan bahwa hanya lansia yang memenuhi syarat yang terdaftar.

Selain itu, kepatuhan juga mencakup ketaatan terhadap prosedur penyaluran bantuan, memastikan bahwa bantuan disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya penyimpangan dalam proses pendaftaran, verifikasi, atau penyaluran bantuan akan mengindikasikan rendahnya tingkat kepatuhan dan berpotensi mengurangi efektivitas program. Kepatuhan juga berarti meminimalkan potensi penyalahgunaan atau korupsi dalam pengelolaan dana KLJ, yang dapat merugikan lansia penerima manfaat.

Kelancaran (*Execution*), dimensi kedua, mengacu pada efisiensi dan efektivitas proses pelaksanaan program, dengan meminimalkan hambatan atau gangguan yang berarti. Indikator kelancaran meliputi ketersediaan sumber daya yang memadai (dana, personel, infrastruktur), koordinasi yang baik antar instansi terkait (Dinas Sosial, Bank DKI, RT/RW), efisiensi dalam penyaluran bantuan (waktu tunggu pencairan, kemudahan akses), serta minimnya keluhan dari penerima manfaat. Dalam konteks KLJ, kelancaran dapat diukur dengan melihat seberapa cepat dan mudah lansia dapat mendaftar dan diverifikasi, seberapa efisien sistem penyaluran bantuan bekerja (apakah lansia harus antri lama atau menghadapi kesulitan dalam mencairkan bantuan), dan seberapa sedikit keluhan yang diterima dari lansia terkait dengan pelayanan yang diberikan. Kurangnya koordinasi antar instansi, misalnya, dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran bantuan, sementara sistem penyaluran yang rumit dapat mempersulit lansia untuk mengakses manfaat mereka.

Kinerja (*Performance*), sebagai dimensi ketiga, mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan, serta dampak yang dihasilkan terhadap

masalah yang ingin diatasi. Dalam konteks program KLJ, kinerja dapat dilihat dari peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar (peningkatan pendapatan atau daya beli), peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan sosial (peningkatan kunjungan ke dokter atau partisipasi dalam kegiatan sosial), serta peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar secara keseluruhan (peningkatan kepuasan hidup atau penurunan tingkat depresi). Kinerja juga dapat diukur dengan melihat perubahan tingkat kemiskinan di antara lansia sebelum dan sesudah implementasi program. Peningkatan kesejahteraan ekonomi, akses layanan, dan pemenuhan kebutuhan dasar akan mengindikasikan kinerja program yang baik, sementara stagnasi atau penurunan akan mengindikasikan sebaliknya. Analisis kinerja juga harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil program, seperti inflasi, perubahan kebijakan, atau bencana alam.

Penelitian ini Mengintegrasikan ketiga dimensi ini ke dalam analisis implementasi KLJ di Kelurahan Cilangkap untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam tentang seberapa efektif program ini benar-benar berjalan di lapangan. Ini bukan hanya tentang mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan, tetapi juga tentang mengukur kualitas implementasi itu sendiri dan dampaknya terhadap kehidupan lansia. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berpihak pada kesejahteraan lansia. Dengan kata lain, analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa KLJ tidak hanya menjadi program yang baik di atas kertas, tetapi juga

program yang benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi lansia di Kelurahan Cilangkap.

Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam implementasi program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berfokus pada pengalaman dan perspektif para pelaksana program serta penerima manfaat KLJ. Analisis dilakukan berdasarkan kerangka teori implementasi kebijakan Ripley dan Franklin melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi untuk memberikan gambaran yang holistik dan kontekstual tentang implementasi program KLJ, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta memahami dampaknya di Kelurahan Cilangkap. Dengan pendekatan kualitatif ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan nuansa yang kaya mengenai realitas pelaksanaan program KLJ di lapangan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan hasil dari konteks di atas dapat disampaikan perumusan masalah penelitian, yaitu “Bagaimana implementasi program kartu lansia di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur?”. Dari perumusan masalah ini selanjutnya dapat dijabarkan lebih mendalam melalui sub permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana kepatuhan (*Compliance*) dalam implementasi program kartu lansia jakarta (KLJ) di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur?

2. Bagaimana kelancaran (*Execution*) dalam implementasi program kartu lansia Jakarta (KLJ) di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur?
3. Kinerja (*Performance*) dalam implementasi program kartu lansia Jakarta (KLJ) di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini terkait dengan implementasi program kartu lansia di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur adalah untuk memperoleh gambaran secara komprehensif sebagai berikut.

1. Kepatuhan (*Compliance*) dalam implementasi program kartu lansia Jakarta (KLJ) di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur?
2. Kelancaran (*Execution*) dalam implementasi program kartu lansia Jakarta (KLJ) di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur?
3. Kinerja (*Performance*) dalam implementasi program kartu lansia Jakarta (KLJ) di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran manfaat dari implementasi Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) di Kelurahan Cilangkap. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan baik secara akademis maupun praktis.

### **1.4.1 Manfaat Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai implementasi Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) di Kelurahan Cilangkap. Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi penting bagi studi-studi selanjutnya dalam bidang ilmu sosial, khususnya dalam konteks profil lulusan Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial dan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memberikan wawasan baru tetapi juga memperkuat basis teori yang ada tentang intervensi sosial bagi kelompok lansia yang rentan.

### **1.4.2 Manfaat Praktik**

Pada segi praktis, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi KLJ di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi penyelenggara program KLJ untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada lanjut usia. Rekomendasi tersebut mencakup langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk memperbaiki efektivitas program. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan tetapi juga memberikan solusi praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan implementasi program.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

**BAB I** : **PENDAHULUAN**, Memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

- BAB II** : **KAJIAN KONSEPTUAL**, Memuat tentang penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan penelitian
- BAB III** : **METODE PENELITIAN**, Memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar belakang, sumber data, dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data, dan jadwal dan langkah-langkah penelitian.
- BAB IV** : **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, Memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.
- BAB V** : **USULAN PROGRAM**, Memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisa kelayakan, dan indikator keberhasilan.
- BAB VI** : **SIMPULAN DAN SARAN**, Memuat tentang kesimpulan dan saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**